

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI ISU**

##### **A. DESKRIPSI ISU (GAMBARAN PROSES PENETAPAN ISU)**

Berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi bersama coach, mentor, rekan kerja dan sesama CPNS di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan, maka penulis merumuskan tiga isu yaitu:

##### **1. Kurangnya Kemandirian Dinas Kominfo Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan.**

Website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan telah dikelola melalui server internal dinas, namun pengelolaannya masih belum sepenuhnya mandiri. Permasalahan muncul karena akses teknis, pembaruan sistem, dan pemeliharaan website belum dapat dilakukan secara internal oleh ASN dinas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan sistem pengelolaan website masih terbatas, sehingga setiap perubahan atau perbaikan memerlukan waktu lama dan koordinasi tambahan dengan pihak lain yang memahami teknis sistem. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pembaruan informasi publik, menurunnya efektivitas komunikasi kelembagaan, serta belum terwujudnya kemandirian digital di lingkungan Dinas Kominfo Papua Selatan.

##### **2. Belum Tersedianya Panduan Digital Resmi dalam Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Dinas Kominfo Papua Selatan.**

Penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan belum berjalan optimal karena hingga kini belum tersedia panduan digital resmi sebagai acuan bagi ASN dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. ASN masih belajar secara mandiri melalui sumber eksternal seperti YouTube dan panduan dari daerah lain. Akibatnya, terjadi perbedaan pemahaman dalam penggunaan fitur aplikasi, belum adanya keseragaman tata kelola naskah dinas elektronik, serta belum maksimalnya kesiapan dinas dalam mendukung penerapan SRIKANDI secara menyeluruh di tahun 2026.

##### **3. Rendahnya Kesadaran ASN terhadap Keamanan Data dan Akun Digital di Lingkungan Dinas Kominfo Papua Selatan.**

Sebagian ASN di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap keamanan data dan akun digital, baik pribadi maupun kedinasan. Banyak ASN belum menerapkan prinsip keamanan dasar seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pergantian password secara berkala, serta kehati-hatian dalam mengakses aplikasi pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan akun oleh pihak luar, dan ancaman terhadap keamanan sistem informasi pemerintahan. Situasi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan budaya keamanan digital (cybersecurity awareness) bagi ASN dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan.

B. PENETAPAN ISU UTAMA

Dalam proses penyusunan kegiatan aktualisasi, langkah penting yang dilakukan sebelum menentukan isu utama adalah melakukan penapisan isu. Tapisan isu bertujuan untuk memilih isu yang paling strategis, relevan, dan layak ditangani oleh peserta Latsar CPNS sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa isu yang diangkat tidak hanya aktual, tetapi juga memiliki urgensi dan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Salah satu metode yang digunakan dalam proses penetapan isu adalah teknik tapisan USG, yaitu analisis yang menilai tingkat Urgency (Kedeshakan/Keperluan Mendesak), Seriousness (Tingkat Keseriusan Dampak), dan Growth (Potensi Perkembangan Masalah di Masa Depan) dari suatu isu. Metode ini umum digunakan dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS karena bersifat objektif, sistematis, dan terukur dalam membantu peserta menentukan isu prioritas yang paling tepat untuk diaktualisasikan.

Tabel. Analisa Kriteria USG

NO	ISU	U (Urgency)	S (Seriousness)	G (Growth)	Total Skor	Keterangan
1	Kurangnya Kemandirian Dinas Kominfo Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan	5	5	4	14	Isu sangat mendesak karena berdampak langsung pada efektivitas komunikasi publik dan keterbukaan informasi pemerintahan. Website merupakan media utama pelayanan informasi kepada masyarakat. Kemandirian digital yang rendah menghambat responsivitas instansi dan menurunkan citra organisasi. Jika tidak segera diatasi, akan menghambat implementasi SPBE dan Smart Governance.
2	Belum Tersedianya Panduan Digital Resmi dalam Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Dinas.	4	4	3	11	Isu bersifat penting namun belum mendesak, karena penerapan SRIKANDI masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan secara menyeluruh pada tahun 2026. Dampaknya belum langsung terhadap pelayanan publik, tetapi perlu penanganan untuk meningkatkan kesiapan internal ASN.
3	Rendahnya Kesadaran ASN terhadap Keamanan Data dan Akun Digital di Lingkungan Dinas Kominfo Papua	3	4	4	11	Isu penting karena berkaitan dengan keamanan informasi dan literasi digital ASN. Namun tingkat urgensinya masih lebih rendah dibanding pengelolaan website, karena dampak langsungnya belum dirasakan secara luas. Perlu dilakukan pembiasaan (habitulasi) jangka panjang melalui pelatihan dan sosialisasi keamanan siber.

Berdasarkan hasil analisis tapisan USG, isu dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai **isu utama aktualisasi**, yaitu **“Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan”**. Isu ini dipilih

karena memiliki tingkat urgensi dan dampak paling besar terhadap peningkatan efektivitas pelayanan informasi publik serta penguatan kemandirian digital ASN di lingkungan Dinas Kominfo Papua Selatan.

### C. PENENTUAN PENYEBAB ISU UTAMA

Dalam tahap ini, dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab dari isu utama yang telah terpilih, yaitu *“Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan.”* Analisis akar permasalahan bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab mendasar yang memengaruhi munculnya permasalahan secara sistemik, sehingga dapat disusun alternatif solusi yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menganalisis akar penyebab permasalahan secara komprehensif dan sistematis, digunakan pendekatan metode Fishbone Diagram atau Ishikawa Diagram. Metode ini merupakan salah satu teknik analisis manajemen mutu yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa (1968), dan sering digunakan untuk menemukan hubungan sebab-akibat dalam suatu permasalahan organisasi. Pendekatan ini efektif dalam mengidentifikasi penyebab-penyebab utama dari suatu masalah melalui pemetaan berdasarkan kategori faktor manajerial yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil identifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab utama dari kurangnya kemandirian Dinas Kominfo Papua Selatan dalam pengelolaan website pemerintahan berasal dari beberapa aspek berikut:

#### 1. Aspek SDM (Human Resources):

Kapasitas ASN di bidang teknologi informasi masih terbatas, di mana sebelumnya pengelolaan website dan server hanya dilakukan oleh beberapa pegawai tertentu tanpa adanya program pelatihan internal berkelanjutan, sehingga proses pengelolaan sistem digital belum berjalan optimal.

#### 2. Aspek Metode dan Prosedur:

Tidak adanya SOP dan panduan kerja baku menyebabkan pengelolaan website bersifat tidak terstruktur dan bergantung pada individu tertentu.

#### 3. Aspek Lingkungan Organisasi:

Budaya kerja digital dan kebijakan internal tentang kemandirian teknologi informasi belum terbentuk secara kuat.

#### 4. Aspek Teknologi dan Infrastruktur:

Meskipun Dinas Kominfo telah memiliki server internal sebagai pusat pengelolaan data pemerintahan, kapasitas dan penerapan sistemnya masih terbatas karena belum seluruh aplikasi terintegrasi serta belum diterapkannya sistem keamanan, kontrol akses, dan backup data secara optimal.

#### 5. Aspek Pendanaan:

Anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM dan sistem pemeliharaan teknologi masih terbatas dan belum menjadi prioritas program bidang APTIKA.

#### D. ANALISA APABILA ISU UTAMA TIDAK DAPAT DI SELESAIKAN

Apabila isu kurangnya kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam pengelolaan website pemerintahan tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi, tata kelola informasi publik, dan citra kelembagaan pemerintah daerah. Keterlambatan dalam pembaruan konten dan penanganan teknis website akan menghambat arus informasi kepada masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, ketergantungan terhadap pihak luar dalam pengelolaan sistem digital berpotensi menimbulkan risiko keamanan data dan menghambat pengembangan kapasitas ASN di bidang teknologi informasi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Dinas Kominfo sebagai instansi teknis, tetapi juga oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergantung pada layanan informasi digital, serta masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari layanan publik berbasis teknologi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*Smart Governance*) yang efisien, aman, dan mandiri di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

#### E. KETERKAITAN ISU UTAMA DENGAN AGENDA KE TIGA

Isu utama yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini, yaitu ***“Kurangnya Kemandirian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan dalam Pengelolaan Website Pemerintahan,”*** memiliki keterkaitan langsung dengan Agenda III Latsar CPNS, yang berfokus pada ***Kedudukan dan Peran ASN dalam Mendukung Terwujudnya Smart Governance***. Agenda ini menekankan pentingnya peran ASN dalam membangun sistem pemerintahan yang cerdas, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks Dinas Kominfo, website pemerintahan merupakan salah satu pilar utama Smart Governance karena berfungsi sebagai media publikasi, komunikasi, serta sarana transparansi informasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Kemandirian Dinas Kominfo dalam mengelola website secara internal mencerminkan penerapan konsep Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki literasi digital tinggi, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta berperan aktif dalam transformasi digital pemerintahan. Upaya peningkatan kapasitas internal ASN di bidang teknologi informasi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penguatan kemampuan ASN dalam pengelolaan website tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja organisasi, tetapi juga memperkuat budaya kerja berbasis inovasi dan kolaborasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Lebih lanjut, isu ini juga sejalan dengan materi pembelajaran pada Agenda III yang meliputi *Manajemen ASN* dan *Smart ASN*, di mana ASN diharapkan memahami perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa dalam era digital. Melalui penyelesaian isu ini, ASN berperan aktif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Kominfo untuk menjadi instansi yang mandiri dalam pengelolaan sistem informasi, sekaligus mewujudkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan inovasi yang menjadi fondasi Smart Governance. Dengan demikian, penyelesaian isu ini bukan hanya bentuk aktualisasi kompetensi ASN yang berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan siap menghadapi tantangan transformasi digital pemerintahan.

## F. GAGASAN KREATIF PEMECAHAN MASALAH UTAMA

Berdasarkan hasil analisis akar permasalahan menggunakan metode *Fishbone Diagram*, diketahui bahwa penyebab utama kurangnya kemandirian *Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan* dalam pengelolaan website pemerintahan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, belum tersedianya pedoman teknis baku dalam pengelolaan sistem, serta belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur digital secara mandiri. Namun demikian, saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui pengembangan **website dinas versi terbaru** yang telah mencapai sekitar 98% penyelesaian. Seluruh proses perancangan dan pembangunan website ini dilakukan secara mandiri oleh SDM internal dinas, khususnya CPNS baru di Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), menggunakan infrastruktur server milik dinas sendiri. Keberhasilan ini menjadi tonggak awal kemandirian digital dinas, dan ke depan pengelolaan serta pengembangannya akan sepenuhnya diambil alih oleh pihak internal dari Bidang APTIKA, sehingga seluruh proses pengelolaan sistem dan konten dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan oleh ASN di lingkungan dinas.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan gagasan kreatif pemecahan masalah berupa ***“Penyusunan Panduan Teknis Digital Pengelolaan Website Pemerintahan sebagai Upaya Penguatan Kemandirian Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.”*** Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan ASN dan CPNS dalam mengelola website pemerintahan secara mandiri, profesional, dan terstandar, sekaligus menjadi dasar pengelolaan berkelanjutan oleh SDM internal dinas. Panduan teknis ini akan memuat prosedur pembaruan konten, pengaturan hak akses pengguna (*user privilege*), tata cara pemeliharaan sistem dan keamanan data, serta mekanisme *backup* dan pemulihan sistem. Selain itu, penyusunan panduan ini akan menjadi sarana *transfer knowledge* dari CPNS pengembang website kepada ASN bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Bidang APTIKA, guna memastikan kesinambungan kompetensi serta kemandirian digital internal instansi.

Untuk mengaktualisasikan gagasan ini, disusun empat langkah kegiatan utama yang aplikatif dan berorientasi hasil, yaitu:

- a. **Melakukan observasi dan pengumpulan data teknis** terkait sistem dan alur kerja website baru, termasuk manajemen konten, keamanan, dan pemeliharaan data.
- b. **Menyusun Panduan Teknis Digital Pengelolaan Website Pemerintahan**, yang menjadi acuan resmi dalam pengelolaan website oleh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.
- c. **Melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan** antara CPNS pengembang sistem dan ASN bidang IKP serta APTIKA dalam memahami mekanisme pengelolaan website secara mandiri.
- d. **Melakukan sosialisasi internal dan uji coba penerapan panduan teknis digital**, sebagai langkah awal implementasi kemandirian pengelolaan website pemerintahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan.